

LAMPIRAN XIV
KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 160.18/488/2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2023

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	4
	1.3 Maksud dan Tujuan	7
	1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II	EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	9
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	9
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	22
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	25
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	27
	3.1 Program dan Kegiatan	27
BAB IV	PENUTUP	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan untuk periode pada triwulan akhir tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Perubahan Rencana kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perubahan kebijakan pemerintah daerah, kondisi ekonomi, rekomposisi pagu kegiatan, penambahan kegiatan baru, penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi kegiatan, dan berbagai faktor lainnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan pada Renja DPMPTSP agar tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah melalui beberapa tahapan, yaitu

1. Persiapan penyusunan Perubahan Renja dengan melihat hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun berjalan sehingga dapat diketahui capaian kinerja yang masih perlu mendapat perhatian.
2. Penyusunan rancangan Perubahan Renja merupakan penyempurnaan usulan dari perangkat daerah dengan memperhatikan kerangka pendanaan daerah.
3. Perumusan rancangan akhir Perubahan Renja merupakan tahapan yang dilaksanakan setelah penetapan Perubahan RKPD sehingga penyusunannya harus mengacu pada Perubahan RKPD yang telah ditetapkan.
4. Penetapan Perubahan Renja yang merupakan tahapan akhir penyusunan renja perangkat daerah dan harus dilaksanakan maksimal dalam 1 bulan setelah penetapan Perubahan RKPD.

Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyelenggaraan kegiatan pada tahun 2023 baik terhadap target capaian kinerja maupun anggaran. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo mempunyai keterkaitan dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya. Keterkaitan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perubahan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah)

Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo merupakan turunan dari RKPD. RKPD adalah dokumen perencanaan strategis tingkat daerah yang menggambarkan arah kebijakan pembangunan daerah dalam jangka menengah. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo dilakukan karena adanya perubahan kebijakan pemerintah daerah, kondisi ekonomi, rekomposisi pagu kegiatan, penambahan kegiatan baru, penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan dalam RKPD yang perlu diakomodasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dengan demikian, Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan menjadi alat pelaksanaan konkret dari perubahan kebijakan dalam RKPD.

2. Renstra (Rencana Strategis) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

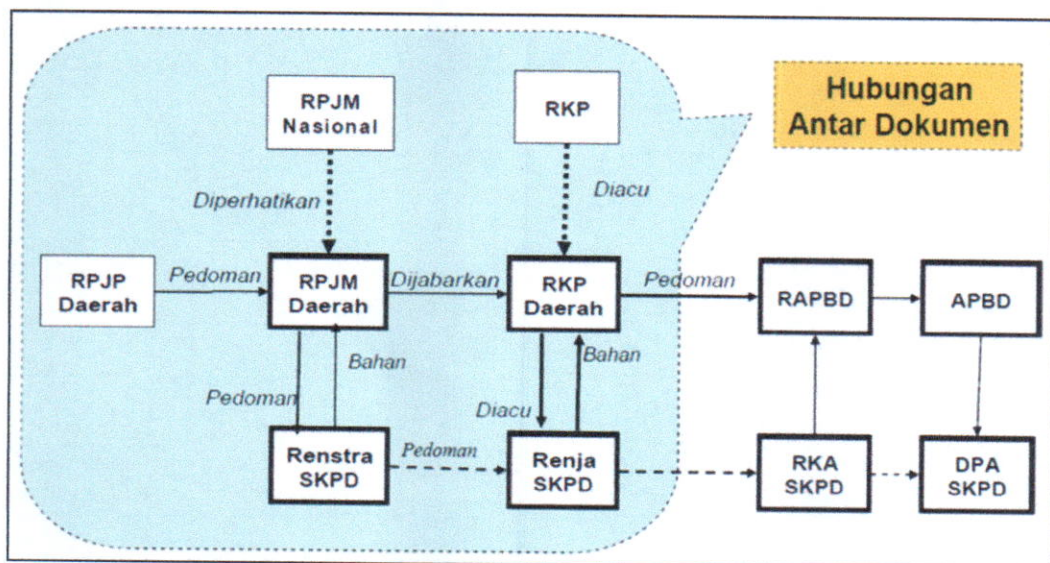
Renstra adalah dokumen perencanaan jangka menengah tingkat perangkat daerah yang lebih rinci daripada RKPD. Renstra menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi perangkat daerah dalam mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD. Perubahan Renja Perangkat Daerah akan mencerminkan perubahan prioritas dan arah strategis dalam Renstra. Hal ini karena Renja merupakan implementasi dari Renstra dan diharapkan dapat mengarahkan pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan.

3. Rencana Kerja Kementerian Investasi

Renja Kementerian / Lembaga adalah dokumen perencanaan kerja yang disusun oleh kementerian atau lembaga pemerintah di tingkat pusat. Rencana Kerja Kementerian Investasi mencakup kebijakan-kebijakan nasional terkait penanaman modal, fasilitasi investasi, dan upaya untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Perubahan Renja DPMPTSP di tingkat daerah harus mencerminkan upaya implementasi dari kebijakan nasional tersebut di tingkat lokal. Dengan begitu, upaya pemerintah pusat dan daerah dapat saling mendukung dan memperkuat untuk mencapai target dan sasaran pembangunan ekonomi.

4. Renja Provinsi Jawa Tengah (Rencana Kerja Provinsi Jawa Tengah)

Renja Provinsi adalah dokumen perencanaan kerja yang disusun oleh pemerintah provinsi. Renja ini akan menguraikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Provinsi Jawa Tengah dalam mencapai sasaran dan target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD. Perubahan Renja DPMPTSP dapat terjadi apabila ada perubahan kebijakan dari pemerintah provinsi yang perlu diakomodasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di tingkat perangkat daerah.



Gambar 1.1 Hubungan antar Dokumen Perencanaan

Dokumen Perubahan Renja yang telah disahkan akan menjadi dasar dalam pembahasan untuk menentukan besarnya RAPBDP (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan) yang akan diurai lebih lanjut dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2022 adalah :

1. Pasal 18 ayat (16) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587;)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Purworejo Tahun

- 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 13);
19. Peraturan daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kabupaten Purworejo (lembaran daerah kabupaten purworejo tahun 2021 nomor 14 seri e nomor 8);
 20. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo;
 21. Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo (seri D nomor 44);
 22. Peraturan Bupati Nomor 134 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2026 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 134 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2026 (seri E Nomor 34);
 23. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Seri E Nomor 19).

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertujuan untuk memperbaharui dan menyelaraskan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan kondisi dan tuntutan terkini yang ada di tingkat daerah. Maksud perubahan ini adalah agar DPMPSTP dapat merespons perubahan lingkungan eksternal dan memastikan kelangsungan rencana kegiatan yang lebih relevan, efektif, dan efisien dalam mendorong investasi dan memberikan pelayanan terpadu kepada Masyarakat dan para investor.

b. Tujuan

1) Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi

Perubahan Renja DPMPTSP bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSP. Dengan mengkaji ulang dan menyesuaikan rencana kerja, DPMPTSP dapat mengidentifikasi program prioritas dan mengalokasikan sumber daya yang tepat untuk mencapai hasil yang lebih maksimal.

2) Penyesuaian dengan Kebijakan dan Prioritas Pemerintah

Tujuan lainnya adalah untuk menyelaraskan Renja DPMPTSP dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maupun daerah. Hal ini penting agar DPMPTSP dapat menjadi bagian dari upaya pemerintah secara keseluruhan dalam mencapai tujuan pembangunan, termasuk dalam meningkatkan investasi dan memperkuat sektor ekonomi.

3) Peningkatan Kualitas Pelayanan

Perubahan Renja DPMPTSP juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan terpadu satu pintu bagi para investor dan pengusaha. Dengan merumuskan rencana kerja yang lebih tepat sasaran, DPMPTSP dapat memberikan layanan yang lebih efektif, cepat, dan transparan dalam proses perizinan dan fasilitasi investasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana kerja (Renja) Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo terdiri dari 4 Bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang gambaran umum penyusunan dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah yang terdiri dari Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan Dokumen Renja Perubahan.

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Berisi tentang evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan, analisis kinerja

pelayanan Perangkat Daerah, dan Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang perubahan nomenklatur, indikator, dan target program, kegiatan, dan sub kegiatan, Perubahan Rencana kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2023, dan penjelasan mengenai sub kegiatan yang mendukung pengarusutamaan gender.

BAB IV PENUTUP

Berisi uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah – kaidah pelaksanaan Perubahan Renja dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Renja Sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

Evaluasi Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu siklus perencanaan pembangunan perangkat daerah yang diawali dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi hasil. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dilakukan setiap triwulan berdasarkan data realisasi kinerja dan anggaran tahun berjalan.

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan OPD dalam kurun waktu II Triwulan terakhir.

Pada Tahun 2022, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu sebesar 6.893.694.449 dari pagu RKPD sebesar 7.681.717.110 dengan capaian kinerja keuangan sebesar 89,74%. Capaian kinerja sebesar angka tersebut diatas masih kurang memuaskan / maksimal, dikarenakan masih dibawah 90 %, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

1. Penyesuaian pagu dan program kegiatan yang pendanaannya bersumber dari DAK yaitu pada Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, sehingga waktu pelaksanaan kegiatan menjadi mundur dari waktu yang sudah direncanakan;
2. Adanya Refokusing Anggaran;
3. Adanya pergeseran rincian belanja pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi penyebab tidak tercapainya target kinerja program kegiatan yaitu perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh DPMPSTP Kabupaten Purworejo dalam pelaksanaan urusan

Penanaman Modal, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Capaian hasil evaluasi pelaksanaan renja Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

No	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (pada tahun terakhir)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana (APBD, DAK, T, P, lainnya)								
				K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	I		II		III	IV	(12 = 8+9+10+11)			(13 = 12/7 * 100%)		(14 = 12/5 * 100%)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)	(11)	(12 = 8+9+10+11)		(13 = 12/7 * 100%)		(14 = 12/5 * 100%)		(15)	(16)						
				K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp				
	Peningatan Kualitas Pelayanan Publik		Index Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat																										
	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik		Index Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat																										
X XX 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PELAKSANAAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100	%	14.573.443.898	100	%	6.201.703.180	100	%	2.930.365.276	25	579.173.319	25	645.963.780			50	%	1.225.137.099	50	%	0,42	50	%	8,41	DPMP TSP	APBD
X XX 01 2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	41	dokumen	120.575.725	16	dokumen	19.750.000	16	dokumen	12.411.000	4	9.465.000	4	2.946.000			8	dokumen	12.411.000	50	dokumen	1,00	20	dokumen	10,3		
X 01 2.01 01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16	Dokumen	32.051.775	16	Dokumen	5.250.000	16	Dokumen	12.411.000	4	9.465.000	4	2.946.000			8	Dokumen	12.411.000	50	dokumen	1,00	50	dokumen	38,72		
X 01 2.01 02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	dokumen	9.157.650	1	dokumen	1.500.000																				

No	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (pada tahun terakhir)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan (2023) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (%)			Unit OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana (APBD, DAK, T, P, lainnya)					
				K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	I		II		III	IV	72 = 8+9+10+11			73 = 12/7 * 100%			74 = 12/5 * 100%							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)			(7)			(8)		(9)		(10)	(11)	(12)			(13)			(14)			(15)	(16)			
X 01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	laporan	30.525.500	5	laporan	5.000.000																							
XX 01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	10.594.417.735	100	%	2.188.962.012	100	%	2.182.402.012	25	402.140.973	25	439.657.703					50	%	841.798.676	50	%	0,39	50	%	7,95			
X XX 01.2.02		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19	Orang/Bulan	10.455.392.397	19	Orang/Bulan	2.166.066.544	19	Orang/Bulan	2.166.066.544	16	399.546.180	16	434.200.775					32	Orang/Bulan	833.746.955	###	Bulan	0,38	168	Bulan	7,974			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	Laporan	12.210.200	6	Laporan	2.000.000																							
X 01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	24	Laporan	114.604.937	24	Laporan	18.895.468	24	Laporan	16.335.468	4	2.594.793	4	5.456.928					8	Laporan	8.051.721	33,33	laporan	0,49	33	laporan	7,026			

No	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (pada tahun terakhir)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan (2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (%)	Unit OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana (APBD, DAK, T, P, lainnya)								
				K	Satuan	Rp		K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	K
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	Dokumen	12.210.200	2	Dokumen	2.000.000																			
X 01 2.07 10		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	177.047.900	100	%	29.000.000																			
X 01 2.05 09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	34	Orang	177.047.900	34	Orang	29.000.000																			
XX 01 1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	866.926.642	100	%	192.367.000	100	%	142.000.400	25	47.613.930	25	50.099.678			50	%	97.713.608	50	%	0,69	50	%	11,3	
X 01 1.06 09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	laporan	866.926.642	1	laporan	192.367.000	1	laporan	142.000.400	0	47.613.930	0	50.099.678			0	Laporan	97.713.608	0	Bulan	0,69	0	Bulan	11,27	

No	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (pada tahun terakhir)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan (2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana (APBD, DAK, Lainnya)						
				K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	I		II		III	IV	12 = 8+9+10+11		13 = 12 / 7 * 100%			14 = 12 / 5 * 100%					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)	(11)	(12)		(13)		(14)		(15)	(16)						
X XX 01 2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Didirikan	1	jenis	2.000.000.000	1	jenis	3.254.306.200																				
X 01 2.07 10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	905	unit	2.000.000.000	905	unit	3.254.306.200																				
XX 01 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	Bulan	440.876.744	3	Laporan	410.327.164	3	Laporan	503.551.864	3	96.986.442	3	130.646.223			6	Laporan	227.632.665	200	Bulan	0,45	50	Bulan	51,6		
X 01 2.08 01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	143.375.221	1	Laporan	23.484.500	1	Laporan	24.963.500	3	9.065.400	3	3.757.100			6	Laporan	12.822.500	600	Bulan	0,51	600	Bulan	8,943		
X 01 2.08 02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	186.205.550	1	Laporan	147.300.000	1	Laporan	155.596.164	3	40.000.837	3	41.089.696			6	Laporan	81.090.533	600	Bulan	0,52	600	Bulan	43,55		

No	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (pada tahun terakhir)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan (2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (%)			Unit OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana (APBD, DAK, TPA, lainnya)					
				(5)			(6)			(7)				(8)					(9)			(10)					(11)				
				K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan		Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan			Rp	K	Satuan	Rp	K
X 01 2.08 04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	111.295.973	1	Laporan	239.542.664	1	Laporan	322.992.200	3	47.920.205	3	85.799.427					6	Laporan	133.719.632	600	Bulan	0,41	600	Bulan	120,1		
K XX 01 1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	2	jenis	373.599.152	2	jenis	106.990.804	2	jenis	90.000.000	1	22.966.974	2	22.614.176					3	jenis	45.581.150	150	jenis	0,51	150	jenis	12,2		
X 01 2.09 1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8	unit	218.480.772	8	unit	59.772.804	8	unit	50.000.000	1	12.726.974	3	11.581.180					4	unit	24.308.154	50	unit	0,49	50	unit	11,13		
X 01 2.09 11		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	90	unit	155.118.381	90	unit	47.218.000	90	unit	40.000.000	48	10.240.000	25	11.032.996					73	unit	21.272.996	81,1	unit	0,53	81	unit	13,71		

No	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (pada tahun terakhir)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana (APBD, DAK, T, lainnya)								
				K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp			K	Satuan	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)			(7)			(8)		(9)		(10)		(11)	(12)									
				K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	(15)	(16)					
2.18.03		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE NOMOR INDUK BERUSAHA YANG TERBIT TERHADAP JUMLAH KEPERMINATAN	99,5	%	754.000.000	99,5	%	203.144.150	99,5	%	41.211.700	25	16.599.030	25	8.601.993			50	%	25.201.023	50	%	0,61	50	%	3,34	DPM P TSP	APBD
2.18.03.2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Izin Usaha Terhadap Jumlah Keperminatan Penanaman Modal	99,5	%	754.000.000	99,5	%	203.144.150	99,5	%	41.211.700	25	16.599.030	25	8.601.993			50	%	25.201.023	50	%	0,61	50	%	3,34		
18.03.2.01.01		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ Kota	1	Dok	366.900.000	1	Dok	59.889.700	1	Dok	10.000.000	0	2.117.000	0	2.315.880			0	Dok	4.432.880	0	Dok	0,44	0	Dok	1,21		
18.03.2.01.02		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	1	Dok	387.100.000	1	Dok	143.254.450	1	Dok	31.211.700	0	14.482.030	0	6.286.113			0	Dok	20.768.143	0	Event	0,67	0	Event	5,37		

No	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Rencana Peringkat Daerah Tahun 2021-2026 (padat tahun terakhir)			Realisasi Capaian Kinerja Rencana Peringkat Daerah sampai dengan Rencana Peringkat Daerah Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja dan Anggaran Rencana OPD Tahun berjalan (2023) yang direvaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana OPD yang direvaluasi				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana OPD Tahun 2022			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana OPD s/d tahun 2026 (%)			Unit OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana (APBD - DAK.T P.Iainnya)		
				K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	I		II		III	IV	K		Rp		K	Satuan	Rp	K	Satuan			Rp	(13)
2.19.04		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PELAYANAN PENANAMAN MODAL SESUAI NSPK	100	%	1.572.000.000	100	%	499.437.208	100	%	294.062.100	20	06.179.007	100	95.501.661					50	%	161.690.329	50	%	0,37	50	%	10,3	OPMPTSP	APBD
19.04.2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Penanaman Modal Sesuai Standar Operasional Pelayanan	100	%	1.572.000.000	100	%	499.437.208	100	%	294.062.100	20	06.179.007	20	95.501.661					50	%	161.690.329	50	%	0,37	50	%	10,3		
19.04.2.01.01		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	2300	Pelaku Usaha	499.000.000	2300	Pelaku Usaha	334.722.900	2300	Pelaku Usaha	179.683.200	8814	41.727.393	9900	38.314.001					18314	Pelaku Usaha	100.041.396	732,6	Bulan	0,36	733	Bulan	20,09		
19.04.2.01.02		Pemantauan Penuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dan Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Penuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	20	Kegiatan Usaha	398.000.000	20	tan U	126.490.808	20	Kegiatan Usaha	99.983.900	21	22.376.272	20	36.369.660					46	Kegiatan Usaha	39.143.952	230	Dak	23,66	230	Dak			
19.04.2.01.03		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	20	Orang	338.000.000	20	Orang	12.913.000	20	Orang	2.493.000	10	1.875.000	15	618.000					23	Orang	2.493.000	125	Dak	REF1	125	Dak			

No	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (pada tahun terakhir)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan (2023) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (%)			Unit OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana (RPBD, DAK, TPA, lainnya)													
				K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	I		II		III	IV	(12 = 8+9+10+11)			(13 = 12/7*100%)			(14 = 12/5*100%)															
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)			(7)			(8)		(9)		(10)	(11)	(12 = 8+9+10+11)			K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	(15)	(16)											
18.04.2.01.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	30	Kegiatan Usaha	338.000.000	30	U	24.310.600	30	Kegiatan Usaha	2.500.000	0	0	0					0	Kegiatan Usaha	0	0	Dok	#REF!	0	Dok													
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																																								
Predikat kinerja Program																																								
2.18.05		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PELAKU USAHA YANG MEMENUHI KETENTUAN NSPK	100	%	1.108.666.667	100	%	399.818.468	100	%	354.700.000	25	7.852.000	25	151.700.000					50	%	159.552.000	50	%	0,45	50	%	14,4	DPMP TSP	APBD									
2.18.05.2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Usaha yang memenuhi Ketentuan Perizinan	100	%	1.108.666.667	100	%	399.818.468	100	%	354.700.000	25	7.852.000	25	151.700.000					50	%	159.552.000	50	%	0,45	50	%	14,39											
18.05.2.01.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	8	Pelaku	554.333.333	8	Pelaku	382.754.276	249	Pelaku	337.630.808	80	7.852.000	120	151.700.000					200	Pelaku Usaha	159.552.000	80,32	Bulan	0,47	###	Bulan	28,78											
18.05.2.01.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	249	Kegiatan Usaha	554.333.333	249	Kegiatan Usaha	17.064.192	8	Kegiatan Usaha	17.069.192	0	0	0	0					0	Kegiatan Usaha	0	0,00	Bulan	0,00		Bulan	0											

No	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (pada tahun terakhir)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan (2023) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (%)			Unit OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana (APBD, DAK, T, P, lainnya)			
				K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	(8)		(9)		(10)	(11)	(12 = 8+9+10+11)		(13 = 12/7*100%)			(14 = 12/5*100%)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)			(7)			(8)		(9)		(10)	(11)	(12 = 8+9+10+11)		(13 = 12/7*100%)			(14 = 12/5*100%)			(15)	(16)	
				K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp		
2.18.06		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE JENIS DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG DISEDIAKAN	100	%	507.800.000	100	%	150.294.104	100	%	32.562.600	25	3.302.549	25	12.335.172			50	%	15.637.721	50	%	0,48	50	%	3,08	DPMP TSP	APBD
2.18.06.2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Data informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	1	Dok	507.800.000	1	Dok	150.294.104	1	Dok	32.562.600	0	3.302.549	0	12.335.172			0	Dok	15.637.721	0	Dok	0,48	0	Dok	3,08		
18.06.2.01.01		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Secara Terintegrasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Terintegrasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4	Dok	507.800.000	4	Dok	150.294.104	4	Dok	32.562.600	0	3.302.549	2	12.335.172			2	Dok	15.637.721		Dok	0,48	50	Dok	3,08		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasar Peraturan Bupati Purworejo Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Beberapa Jenis Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi, Ada 44 (empat puluh empat) Perizinan yang dilayani yaitu:

Tabel 2.1 Jenis Layanan Perizinan DPMPTSP Kabupaten Purworejo

NO	NAMA IZIN
1	IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
2	IZIN PENYAMBUNGAN JALAN DENGAN JALAN UMUM
4	IZIN PEMAKAIAN TANAH PENGAIRAN DENGAN LUAS SAMPAI 1000 M
5	IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON FORMAL
6	IZIN PENYELENGGARAAN UNIT TRANSFUSI DARAH MILIK PMI
7	IZIN PENDIRIAN PRASARANA OLAH RAGA
8	IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT
9	IZIN PRAKTIK PENATA ANESTESI
10	IZIN PRAKTIK FISIOTERAPI
11	IZIN PRAKTIK RADIOGRAFER
12	IZIN JAGAL HEWAN
13	IZIN PRAKTIK PSIKOLOGIS KLINIS
14	IZIN LINGKUNGAN
15	IZIN MEMBAWA BENDA CAGAR BUDAYA KE LUAR DAERAH
16	PKL (IZIN RISET SURVAI PENELITIAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN)
17	LSM (IZIN RISET SURVEI PENELITIAN UNTUK LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT)
18	IZIN REKLAME
19	IZIN WARUNG INTERNET DAN GAME NET
20	IZIN OPERASIONAL PANTI
21	IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN UANG/BARANG
22	IZIN PENGGUNAAN ARSIP YANG BERSIFAT TERTUTUP
23	IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT
23	IZIN OPERASIONAL DAN PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT
24	IZIN OPERASIONAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

NO	NAMA IZIN
25	IZIN MENDIRIKAN KLINIK
26	IZIN OPERASIONAL KLINIK
27	IZIN PENYELENGGARAAN RADIOLOGI DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
28	IZIN PRAKTIK DOKTER UMUM/DOKTER GIGI/DOKTER SPESIALIS/GIGI SPESIALIS
29	SIPA (IZIN PRAKTEK APOTEKER)
	SIPB DAN SIKIB (IZIN PRAKTIK DAN IZIN KERJA BIDAN)
30	SIPP DAN SIKP (IZIN PRAKTIK DN IZIN PERAWAT)
31	SIKTTK (IZIN TENAGA KERJA KEFARMASIAN)
32	SIK-ALM(IZIN PENYELANGGARAAN PRAKTIK AHLI TEGNOLOGI LABOLATORIUM MEDIK)
33	SIK-E DAN SIPE (IZIN KERJA PRAKTIK ELEKTROMEDIS)
34	SIPTGZ DAN SIKTGZ (IZIN KERJA PRAKTIK TENAGA GIZI)
35	SIKTS (IZIN KERJA TENAGA SANITARIAN)
36	IZIN KERJA PEREKAM MEDIS
37	SIKRO (IZIN KERJA REFRAKSIONIS OPTISIEN DAN OPTROMETIS)
38	ISIPTKT (IZIN KERJA DAN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL)
39	IZIN PRAKTIK TERAPIS WICARA (SIPTW)
40	IZIN KERJA DAN PRAKTIK OKUPASI TERAPIS (SIKOT&SIPOT)
41	IZIN PRAKTIK PSIKOLOG (SIPPK)
42	IZIN KERJA TENAGA AHLI KESEHATAN MASYARAKAT (SIK-KESMAS)
43	IZIN PRAKTIK TEKNISI TRANSFUSI DARAH (SIP-TTD)
44	STPT (SURAT TANDA TERDAFTAR PENYEHAT TRADISIONAL)

Dalam melaksanakan pelayanan, DPMPSTSP telah menggunakan SOP (Standar Operasional Prosedur), SPP (Standar Pelayanan Perizinan), maupun SPM (Standar Pelayanan Minimal) sehingga masyarakat pemohon izin dapat mengetahui persyaratan maupun pengurusan perizinan dengan mudah, jelas, transparan dan tepat waktunya.

Standar Pelayanan Perizinan (SPP) ini memberikan gambaran kepada seluruh stakeholder Kabupaten Purworejo khususnya pemangku kegiatan dan masyarakat pada umumnya akan kepastian

dan transparansi proses pelayanan perizinan di DPMPTSP Kabupaten Purworejo. Sebagai tindak lanjut Standar Pelayanan Perizinan (SPP), dilengkapi dengan dasar hukum, persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk pelayanan, sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, penanganan pengaduan, saran dan masukan, jaminan pelayanan, dan evaluasi kinerja pelaksana.

Dengan adanya Standar Pelayanan ini diharapkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam melayani semua pemohon akan semakin mudah untuk dipantau, diawasi dan diukur oleh seluruh stakeholder sehingga secara penyelenggaraan pelayanan perizinan menjadi transparan dan akuntabel.

Tabel 2.3 Permasalahan dalam Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Permasalahan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kurangnya Anggaran untuk pembayaran tagihan listrik dan air
2	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP berencana untuk membangun Purworejo Investment Center (PIC) sehingga membutuhkan tambahan anggaran untuk pembuatan database
3	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	

	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Banyaknya pemohon izin sehingga kebutuhan stiker perizinan juga semakin bertambah sehingga perlunya tambahan pengadaan pembuatan stiker perizinan
4	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kurangnya Anggaran untuk kegiatan pengawasan terhadap pelaku usaha, sehingga diperlukan tambahan anggaran untuk koordinasi dan konsultasi kepada pelaku usaha

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Tingkat kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sangat penting dalam menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pelayanan perizinan dan investasi di daerah. Beberapa hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

1. Lamanya proses perizinan

Jika proses perizinan terlalu lama dan rumit, akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi pelaku usaha, menghambat investasi, dan meningkatkan tingkat korupsi.

2. Ketidaktransparan dan korupsi

Jika terdapat praktik korupsi dalam pelayanan perangkat daerah, akan merugikan pihak-pihak yang berusaha memperoleh izin dan memberi dampak negatif bagi perekonomian daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi DPMPTSP, beberapa permasalahan dan hambatan yang sering dihadapi adalah:

1. Kuantitas dan kualitas SDM masih kurang;
2. Kompetensi Aparatur Sipil Negara menurun karena berkurangnya pelaksanaan diklat yang diselenggarakan baik oleh instansi daerah maupun instansi vertikal untuk menambah keahlian dan keterampilan ASN;
3. Peluang investasi yang ada belum bisa di konversi menjadi investasi sektor riil secara optimal.

Kurang maksimalnya kinerja pelayanan DPMPTSP dapat berdampak negatif pada pencapaian visi dan misi kepala daerah, seperti:

1. Penghambat pertumbuhan ekonomi

Jika pelayanan perizinan lambat dan rumit, akan menghambat investasi dan pembangunan di daerah, yang dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi.

2. Tidak tercapainya target program nasional/internasional

Jika pelayanan perangkat daerah tidak sesuai dengan standar nasional/internasional seperti NSPK, SPM (Standar Pelayanan Minimal), dan SDGs (Sustainable Development Goals), maka target pencapaian program-program tersebut tidak akan tercapai.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdapat beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan salah satunya adalah Terus meningkatnya tuntutan dari masyarakat dan pelaku usaha untuk mendapatkan pelayanan yang cepat, transparan, dan mudah diakses. Penggunaan teknologi informasi yang canggih dan solusi e-government dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan perangkat daerah.

Beberapa rekomendasi dan catatan strategis yang dapat ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan antara lain:

1. Meningkatkan SDM

Melalui pelatihan dan pengembangan SDM, serta perekrutan tenaga ahli, guna meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan DPMPTSP.

2. Menerapkan Teknologi Informasi

Memperkuat sistem informasi DPMPTSP untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan perizinan.

3. Memperkuat Pengawasan dan Penerapan Integritas

Menerapkan mekanisme pengawasan yang ketat dan memastikan integritas dalam setiap tahap pelayanan DPMPTSP untuk mencegah praktik korupsi.

4. Peningkatan Komunikasi dengan Masyarakat dan Pelaku Usaha

Melalui penyuluhan dan sosialisasi, untuk memahamkan masyarakat dan pelaku usaha mengenai prosedur perizinan.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam merumuskan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo, terdapat beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berikut adalah beberapa faktor penting yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan:

1. Kebijakan Pemerintah

Program dan kegiatan DPMPTSP harus selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dan daerah terkait investasi, perizinan, dan pengembangan ekonomi. Pengarahan dan arahan dari pemerintah merupakan landasan untuk merumuskan Program dan Kegiatan DPMPTSP.

2. Pencapaian visi dan misi kepala daerah

Program dan kegiatan DPMPTSP harus selaras dan mendukung Pencapaian visi dan misi kepala daerah.

3. Peran dan Fungsi DPMPTSP

Faktor ini berkaitan dengan mandat dan tugas DPMPTSP sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan perizinan dan pelayanan investasi. Program dan kegiatan harus sejalan dengan peran dan fungsi lembaga tersebut.

4. Anggaran dan Sumber Daya

Penyusunan program dan kegiatan harus mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan sumber daya manusia yang ada. Hal ini untuk memastikan program yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan efisien dan efektif.

5. Monitoring dan Evaluasi

DPMPTSP perlu memiliki mekanisme monitoring dan evaluasi yang baik untuk mengukur kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Data hasil evaluasi ini dapat menjadi bahan untuk perbaikan dan peningkatan di masa yang akan datang.

Dalam rencana penyusunan program dan kegiatan, DPMPTSP memiliki 6 (enam) Program, 11 (sebelas) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan dengan pendanaan dari APBD Kabupaten Purworejo sebesar 3.423.613.176 dan DAK Non Fisik sebesar 366.700.000 dengan total anggaran sebesar Rp 3.790.313.176.

Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten purworejo dalam melaksanakan program kegiatan tahun anggaran 2023 sudah mendukung Pengarusutamaan gender yaitu pada Program Pelayanan Penanaman Modal pada kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota pada sub kegiatan :

1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

Pengarusutamaan gender merupakan rangkaian strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam pengembangan institusi, kebijakan dan program kerja, termasuk di dalamnya disain dan pelaksanaan kebijakan, program, monitoring, dan evaluasi, serta dalam kerjasama dengan pihak luar dan atau pihak eksternal.

Dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdapat beberapa hal yang menyebabkan perlunya perubahan rencana kerja.

Tabel 3.1 Penyesuaian Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Hasil Kegiatan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan		Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Jenis Keg. a/b/c
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PELAKSANAAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	PERSENTASE PELAKSANAAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	100 %	100 %	a
X XX 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 dokumen	16 dokumen	a
X XX 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 Dokumen	16 Dokumen	a
X XX 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	a
X XX 01 2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/ Bulan	19 Orang/ Bulan	a
X XX 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	24 Laporan	24 Laporan	a
X XX 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	a
X XX 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	a
X XX 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	3 Laporan	a
X XX 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	a

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan		Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Jenis Keg. a/b/c
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
X XX 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	a
X XX 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	a
X XX 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	2 jenis	2 jenis	a
X XX 01 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit	8 unit	a
X XX 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	90 unit	90 unit	a
2.18.2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	PERTUMBUHAN JUMLAH KEPERMINATAN PENANAMAN MODAL	PERTUMBUHAN JUMLAH KEPERMINATAN PENANAMAN MODAL	5 % %	5 % %	a
2.18.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan Regulasi Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Ketersediaan Regulasi Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1	1	a
2.18.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dok	1 Dok	a
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten	Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten	1	1	a
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dok	1 Dok	a
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE NOMOR INDUK BERUSAHA YANG TERBIT TERHADAP JUMLAH KEPERMINATAN	PERSENTASE NOMOR INDUK BERUSAHA YANG TERBIT TERHADAP JUMLAH KEPERMINATAN	99,5 %	99,5 %	a

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan		Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Jenis Keg. a/b/c
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Izin Usaha Terhadap Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal	Persentase Izin Usaha Terhadap Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal	99,5 %	99,5 %	a
2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dok	1 Dok	a
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dok	1 Dok	a
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PELAYANAN PENANAMAN MODAL SESUAI NSPK	PERSENTASE PELAYANAN PENANAMAN MODAL SESUAI NSPK	100 %	100 %	a
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Penanaman Modal Sesuai Standar Operasional Pelayanan	Persentase Pelayanan Penanaman Modal Sesuai Standar Operasional Pelayanan	100 %	100 %	a
2 18 04 2.01 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2500 Pelaku Usaha	2500 Pelaku Usaha	a
2 18 04 2.01 02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	20 Kegiatan Usaha	Kegiatan Usa	a
2 18 04 2.01 03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	20 Orang	20 Orang	a
3 18 04 2.01 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	30 Kegiatan Usaha	Kegiatan Usa	a
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PELAKU USAHA YANG MEMENUHI KETENTUAN NSPK	PERSENTASE PELAKU USAHA YANG MEMENUHI KETENTUAN NSPK	100 %	100 %	a

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan		Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Jenis Keg.
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Usaha yang memenuhi Ketentuan Perizinan	Persentase Usaha yang memenuhi Ketentuan Perizinan	100 %	100 %	a
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	249 Pelaku Usaha	9 Pelaku Usa	a
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	8 Kegiatan Usaha	8 Kegiatan Usaha	a
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE JENIS DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG DISEDIAKAN	PERSENTASE JENIS DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG DISEDIAKAN	100 %	100 %	a
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Data informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	Data informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	1 Dok	1 Dok	a
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Dok	4 Dok	a

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Purworejo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dan/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)			Tolok Ukur	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum					Sesudah		
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2.18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL														3.693.313.176	3.790.313.176	4.390.208.140		
2.18	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														2.930.365.276	2.990.365.276	3.190.082.148		
2.18	01	2.0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														12.411.000	12.411.000	23.000.000	
2.18	01	2.0	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	15 Dokumen	15 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	12.411.000	12.411.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	5.500.000
2.18	01	2.0	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	2.000.000
2.18	01	2.0	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	2.000.000
2.18	01	2.0	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Terusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	2.500.000
2.18	01	2.0	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Terusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	2.500.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Dana Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
21801207	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Laporan Ke Bulanan/ Triwulana Semesteran SKPD dan Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulan	uangannya/ Terlaksananya Anggaran/ Pelaksanaan Kegiatan Daerah	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	26 Laporan	26 Laporan	100 %	100 %	16.335.468	16.335.468	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	20.000.000	
21801208	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Terlayannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	3.000.000	
21801205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											0	0			30.000.000		
21801209	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terlayannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	20 Orang	20 Orang	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	30.000.000	
21801206	Administrasi Umum Perangkat Daerah											142.000.400	165.000.400			145.000.400		
21801209	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Laporan hasil penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD: rapat koordinasi (internal & eksternal), konsultasi dalam dan luar daerah dalam kurun waktu satu tahun	Terlayannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	142.000.400	165.000.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	145.000.400	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja							Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Pagu Indikatif (Rp.)			Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah			Sebelum	Setelah			
18 01 2.0 9 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Gedung Ka dan Bangunan Lain yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	2 Jenis	2 Jenis	0	0	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	20.000.000		
18 01 2.0 9 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	80 Unit	80 Unit	2 Jenis	2 Jenis	40.000.000	40.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	35.408.000	
18 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL										49.811.500	49.811.500				276.000.000		
18 02 2.0 1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota										46.011.500	46.011.500				235.000.000		
18 02 2.0 1 01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Pertumbuhan Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Tersusunnya Regulasi Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 %	5 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	46.011.500	46.011.500	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Pertumbuhan Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal	5 %	235.000.000	
18 02 2.0 2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota										3.800.000	3.800.000				41.000.000		
18 02 2.0 2 02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Tersusunnya Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.800.000	3.800.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Pertumbuhan Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal	100 %	41.000.000	
18 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL										41.211.700	56.211.700				184.000.000		
18 03 2.0 1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota										41.211.700	56.211.700				184.000.000		
18 03 2.0 1 01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Persentase Nomor Induk Berusaha yang Terbit terhadap Jumlah Kepeminatan	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Izin Usaha Terhadap Kepeminatan Penanaman Modal	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,5 %	99,5 %	1 Dokumen	1 Dokumen	99,5 %	99,5 %	10.000.000	10.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Persentase Nomor Induk Berusaha yang Terbit terhadap Jumlah Kepeminatan	99,5 %	57.000.000	
18 03 2.0 1 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Nomor Induk Berusaha yang Terbit terhadap Jumlah Kepeminatan	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Terlaksananya Izin Usaha Terhadap Kepeminatan Penanaman Modal	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,5 %	99,5 %	1 Dokumen	1 Dokumen	99,5 %	99,5 %	31.211.700	46.211.700	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Persentase Nomor Induk Berusaha yang Terbit terhadap Jumlah Kepeminatan	99,5 %	127.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
2 18 05		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL														200.000.000		
2 18 05	2.0 1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota														200.000.000		
2 18 05	2.0 1 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang Memenuhi Ketentuan NSPK	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terpenuhinya Ketentuan Perizinan Berusaha	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	8 Pelaku Usaha	249 Pelaku Usaha	100 %	100 %	337.630.808	337.630.808	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Persentase Pelaku Usaha yang Memenuhi Ketentuan NSPK	100 %	100.000.000
2 18 05	2.0 1 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang Memenuhi Ketentuan NSPK	Jumlah Kegiatan Usaha dan Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Terpenuhinya Ketentuan Perizinan Berusaha	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	249 Kegiatan Usaha	8 Kegiatan Usaha	100 %	100 %	17.069.192	29.069.192	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Persentase Pelaku Usaha yang Memenuhi Ketentuan NSPK	100 %	100.000.000
2 18 06		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL														130.000.000		
2 18 06	2.0 1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														130.000.000		
2 18 06	2.0 1 01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase Jenis Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Disediakan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Terkelolanya Data Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100 %	32.562.600	32.562.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Jenis Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Disediakan	100 %	130.000.000
TOTAL												3.693.313.176	3.790.313.176			4.390.208.140		

Tabel 3.3 Sasaran Program, Keluaran Kegiatan, dan Sasaran Sub Kegiatan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN/SASARAN SUB KEGIATAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN/SASARAN SUB KEGIATAN
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan Regulasi Pengembangan Iklim Penanaman Modal
	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Terbitnya Nomor Induk Berusaha
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Izin Usaha Terhadap Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Tersusunnya Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Penanaman Modal Sesuai Norma Standar Prosedur Dan Kriteria
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Penanaman Modal Sesuai Standar Operasional Pelayanan
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bagi Pelaku usaha
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Terlaksananya Pemantauan Pemenuhan Kepatuhan atas Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Tersedianya Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pelaku Usaha Yang Memenuhi Ketentuan Nspk
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi	Persentase Usaha yang memenuhi Ketentuan Perizinan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN/SASARAN SUB KEGIATAN
	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Tersedianya Jenis Data Dan Informasi Perizinan Dan Nonperizinan
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Data informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purworejo Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan dan digunakan sebagai rujukan dalam melaksanakan program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Purworejo Tahun 2023. Perubahan Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Purworejo ini telah disusun seoptimal mungkin dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 dan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2023.

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja DPMPTSP Kabupaten Purworejo Tahun 2023 antara lain:

1. Perubahan dalam Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Purworejo ini dilandasi dengan hasil evaluasi kinerja dan permasalahan yang dihadapi pada tahun 2023 sampai dengan triwulan II.
2. Penyusunan Perubahan Renja DPMPTSP ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja DPMPTSP Kabupaten Purworejo Tahun 2023 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) DPMPTSP Kabupaten Purworejo Tahun 2023;

c. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja DPMPTSP Kabupaten Purworejo Tahun 2023 adalah perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja DPMPTSP Kabupaten Purworejo Tahun 2023 pada akhir tahun 2023;

Selanjutnya program dan kegiatan pada Perubahan Renja DPMPTSP Kabupaten Purworejo Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai DPMPTSP Kabupaten Purworejo,

dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kabupaten Purworejo.

Dengan disusunnya Perubahan Renja DPMPTSP Kabupaten Purworejo Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Perubahan renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Purworejo pada Tahun Anggaran 2023.

BUPATI PURWOREJO



AGUS BASTIAN